



## Politisasi Kebijakan Program Marasa Ali Baal Masdar

Muh. Fajar Ramadhan

Universitas Hasanuddin

Email : [fajarnabila4749@gmail.com](mailto:fajarnabila4749@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data *literature review*. Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi termuda, yang masih terdapat banyak desa dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, maka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan, diperlukan suatu cara penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; program Desa Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan program yang dirancang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan yang strategis dan terintegrasi lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang mandiri, cerdas dan sehat.

**Kata Kunci** : Politisasi, Kebijakan, MARASA

### PENDAHULUAN

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan,<sup>1</sup> Implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau Dekrit Presiden). Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan, kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.<sup>3</sup> Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 bahwa kesehatan

<sup>1</sup> BARAT, GUBERNUR SULAWESI. "PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT." 2019

<sup>2</sup> Waranta, Admin. *Program MARASA*. 2021. <http://wartakominfo.polmankab.go.id/gubernur-sulbar-buka-rakor-sinkronisasi-program-marasa-tahun-2021-di-polewali-mandar> (diakses 2023).

<sup>3</sup> Ulandari, Fadillah. "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmard dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014: 7(1)



merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi termuda, yang masih terdapat banyak desa dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, maka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan, diperlukan suatu cara penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, program Desa Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan program yang dirancang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan yang strategis dan terintegrasi lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang mandiri, cerdas dan sehat.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu kualitatif deskriptif, Penelitian ini menggunakan metode penelitian SLR. *Systematic Literature Review* (SLR) adalah cara untuk menemukan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang relevan dengan rumusan masalah atau topik kajian, *Systematic Literature Review* (SLR) ini bertujuan untuk mengungkap teori-teori yang relevan dengan kasus-kasus dalam penelitian ini, yang mengkaji lebih dalam tentang, serta strategi yang akan membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta perspektif yang beragam terhadap isu yang diteliti yaitu politisasi kebijakan program Marasa Ali Baal Masdar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Diskusi

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi termuda, yang masih terdapat banyak desa dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, maka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan,<sup>5</sup> diperlukan suatu cara penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; program Desa Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 merupakan program yang dirancang untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penanganan yang strategis dan terintegrasi lintas sektor untuk mencapai masyarakat yang mandiri, cerdas dan sehat.<sup>6</sup>

tujuan dari program MARASA ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan berbasis sinergi dan integrasi program pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang berbasis spasial perdesaan dan sumber daya lokal. Ali Baal Masdar mengatakan bahwa rapat koordinasi program MARASA yang dilakukan kiranya dapat dijadikan wadah diskusi untuk merumuskan poin-poin penting program yang sudah berjalan dan identifikasi kelemahan dan kekurangan program serta mencari solusi untuk memperbaikinya.<sup>7</sup> Saat ini program MARASA telah menginjak tahun ketiga, dan kebijakan pemerintah daerah untuk lebih menyentuh program MARASA dengan sasaran 43 desa dan juga kelurahan yang fokus pada pola pemberdayaan masyarakat di kelurahan.<sup>8</sup> Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam APBD sangat terbatas sehingga perlu dicari solusi agar program MARASA dapat berkolaborasi dengan program CSR yang ada di wilayah Sulawesi Barat sehingga program tersebut dapat menjadi milik daerah seutuhnya.<sup>9</sup> Program MARASA diharapkan dapat menjadi sebuah model pembelajaran di dalam perencanaan program kegiatan desa berbasis pada tata data yang ada di desa dan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat baik dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa serta permasalahan yang dihadapi oleh desanya sendiri.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Rismana, Eriawan. "KAJIAN PROSES PRODUKSI GARAM ANEKA PANGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA SUMBER BAHAN BAKU." *Jurnal Chem*, 2014: 7(1)

<sup>5</sup> Halim, Wimmy. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang." *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2020: 3(1).

<sup>6</sup> Anonim. *Audit Kinerja dalam rangka Memberikan Rekomendasi Strategis dan Nilai Tambah*. 2020. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/46/28546/5/Audit-Kinerja-dalam-rangka-Memberikan-Rekomendasi-Strategis-dan-Nilai-Tambah> (diakses 2023).

<sup>7</sup> Hidayat, Fauzan. "POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA*, 2021: 14(2)

<sup>8</sup> Ulandari, Fadillah. "Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmard dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014: 7(1)

<sup>9</sup> Waranta, Admin. *Program MARASA*. 2021. <http://wartakominfo.polkab.go.id/gubernur-sulbar-buka-rakor-sinkronisasi-program-marasa-tahun-2021-di-polewali-mandar> (diakses 2023).

<sup>10</sup> Mahpudin. "PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN

Program MARASA dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

- a. Partisipatif: Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bahwa Program MARASA dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan lainnya
- b. Transparan: Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bahwa Program MARASA dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Program MARASA
- c. Akuntabel: Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
- d. Terintegrasi: Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian seluruh kegiatan hendaknya merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah dan jajarannya.
- e. Berkelanjutan: Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, mengharuskan adanya Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas Pelaksanaan harus berjalan terus menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
- f. Komprehensif: Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bahwa dalam pelaksanaan Program MARASA, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat.<sup>11</sup>

## SIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari program MARASA yaitu untuk mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian melalui upaya pengintegrasian sumber daya ekonomi pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan, sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergitas antara output program dan kegiatan pemerintah daerah pada lokus desa. Adapun yang menjadi sasaran yaitu desa dan usaha ekonomi masyarakat, berkembangnya potensi yang layak pasar lokal nasional maupun internasional dalam rangka menciptakan kemandirian desa, terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketinggalan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. *Audit Kinerja dalam rangka Memberikan Rekomendasi Strategis dan Nilai Tambah*. 2020. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/46/28546/5/Audit-Kinerja-dalam-rangka-Memberikan-Rekomendasi-Strategis-dan-Nilai-Tambah> (diakses 2023).
- BARAT, GUBERNUR SULAWESI. "PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT." 2019.
- Habibah. *KLANISASI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS POLITIK KLAN H. ANDI MASDAR PASMAR)*. Skripsi, Makassar: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, 2016.
- Halim, Wimmy. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang." *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2020: 3(1).
- Hidayat, Fauzan. "POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA*, 2021: 14(2).
- Mahpudin. "PEMILIHAN SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PRAKTIK POLITISASI ANGGARAN DAN BANTUAN SOSIAL OLEH CALON PETAHANA." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2021: 2(2).
- Prayudi. "POLITIK BINWAS PROVINSI TERHADAP KABUPATEN/KOTA (Kasus Bangka Belitung dan

SOSIAL OLEH CALON PETAHANA." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2021: 2(2).

<sup>11</sup> Habibah. *KLANISASI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS POLITIK KLAN H. ANDI MASDAR PASMAR)*. Skripsi, Makassar: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR, 2016



Sulawesi Selatan).” *Jurnal Politica*, 2015: 6(1).

Rismana, Eriawan. “KAJIAN PROSES PRODUKSI GARAM ANEKA PANGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA SUMBER BAHAN BAKU.” *Jurnal Chem*, 2014: 7(1).

Ulandari, Fadillah. “Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmard dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014: 7(1).

Waranta, Admin. *Program MARASA*. 2021. <http://wartakominfo.polmankab.go.id/gubernur-sulbar-buka-rakor-sinkronisasi-program-marasa-tahun-2021-di-polewali-mandar> (diakses 2023).

Yunus. “POLITISASI BIROKRASI PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara).” *Jurnal Sosial dan Politik*, 2017.